

## BERDAYAKAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK Sleman Raih Anugerah Parahita Ekapraya



KR-Istimewa

**Bupati Kustini dan Kepala Dinas P3AP2KB Suci Iriani memperlihatkan penghargaan APE.**

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor. Penghargaan diberikan secara virtual dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Smart Room Diskominfo Kabupaten Sleman, Rabu (13/10).

Raihan Kategori Mentor dalam APE yang menjadi penghargaan kategori tertinggi tersebut, menurut Bupati Kustini SP menjadi motivasi untuk senantiasa berupaya melaksanakan pembangunan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sleman. Terlebih lagi penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya juga melihat keterlibatan dan peran serta aktif dari berbagai komponen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pemberdayaan kaum perempuan dan anak-anak.

"Alhamdulillah Kabupaten Sleman bisa mempertahankan penghargaan ini, sebelumnya pernah di raih Kabupaten

Sleman pada tahun 2018," ujar Bupati, seraya menekankan, Pemkab Sleman melalui Dinas P3AP2KB terus menjaga komitmen menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak dan perdagangan manusia. Selain itu memastikan perempuan memiliki akses ke sumber daya ekonomi.

Sementara Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, penghargaan APE 2020 yang digelar pada 2021 tersebut terdapat 13 kementerian/lembaga, 29 provinsi dan 266 kabupaten/kota yang menerima penghargaan. APE yang diberikan setiap dua tahun sejak tahun 2006 merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkeadilan gender. "Sekaligus juga melakukan gambaran implementasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atas usaha mereka melaksanakan strategi pengarusutamaan gender," jelasnya. **(Has)-f**

## ALIH FUNGSI LAHAN BUTUH PERHATIAN Gubernur Minta Pembangunan Rumah Vertikal

**SLEMAN (KR)** - Adanya alih fungsi lahan yang cukup masif perlu mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak. Karena jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya berdampak pada berkurangnya lahan produktif, tapi juga bisa mempengaruhi perubahan iklim. Adanya kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak.

Untuk itu Gubernur DIY meminta kepada pemerintah kabupaten/kota termasuk Sleman agar pembangunan rumah mulai diatur berapa persen untuk bangunan dan berapa persen untuk halaman terbuka. Dengan demikian akan banyak ruang terbuka hijau privat maupun publik.

"Dalam kondisi seperti sekarang kita tidak bisa melarang orang luar untuk tinggal di DIY dan membangun rumah. Untuk itu yang bisa dilakukan adalah membatasi pembangunan rumah lebih ke arah vertikal (ke atas) ketimbang horizontal yang bisa memakan banyak lahan. Jadi kalau saya lebih cenderung bagaimana Sleman itu membatasi, dalam arti membatasi bukan orang tidak boleh tinggal di Sleman tapi sudah harus membangun tidak boleh melebar dalam arti tanah yang luas tapi naik (vertikal)," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi alih fungsi lahan yang masif di Kompleks Kepatihan, Selasa (12/10).

Komentar senada diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji. Menurutnya, soal alih fungsi lahan sudah ada regulasinya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan

Daerah (Perda) yang mengatur tentang daerah mana saja yang boleh dialih-fungsikan. Selain itu juga ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur daerah mana saja yang difungsikan untuk pertanian, lahan terbuka hijau, maupun untuk permukiman. Apabila semua pemangku kepentingan mematuhi regulasi, tidak akan terjadi alih fungsi lahan secara sembarangan.

"Saat membuat regulasi soal alih fungsi lahan pasti sudah dipikirkan bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Supaya keseimbangan ekosistem, ketersediaan air dan juga perubahan iklim. Tentu selain pemangku kepentingan diminta mematuhi regulasi yang ada, pemerintah daerah tetap berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan," terang Baskara Aji.

Dikatakan, selain beberapa hal di atas, pemanfaatan tanah kas desa juga sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Jadi izin pemanfaatan tanah kas desa harus sesuai izin peruntukan. Misalnya izinnya digunakan untuk tempat wisata harus digunakan untuk tempat wisata bukan pemukiman. Karena saat memberikan izin sudah dipertimbangkan soal RTRW.

"Kalau izinnya dipergunakan untuk ekowisata atau pertanian ya harus benar-benar digunakan untuk itu. Karena pada saat memberikan izin, Gubernur sudah mempertimbangkan RTRW dan peraturan Gubernur tentang alih status tanah," ujarnya. **(Ria)-f**

## URUS NIB VERSI OSS NBA

# Pelaku Usaha Tak Dikenai Biaya

**GAMPING (KR)** - Pemkab Sleman melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus melakukan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Versi OSS NBA. Bertempat di Gedung Balai Kalurahan Nogotirto Gamping, Selasa (12/10) sosialisasi diberikan untuk UMKM Nogotirto dan dihadiri Bupati Kustini SP.

Menurut Bupati, manfaat Online Single Submission (OSS) adalah mempermudah berbagai perizinan. Hal tersebut mencakup prasyarat untuk melakukan usaha, seperti izin mengenai lokasi, lingkungan dan juga bangunan.

"Saya berharap para pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik mungkin. Semoga kegiatan ini dapat



KR-Istimewa

**Bupati mengamati salah satu produk UMKM Nogotirto.**

menjadi media untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM di Kalurahan Nogotirto dalam pembuatan NIB UMKM," jelasnya.

Bupati juga mengingatkan, dengan tertib administrasi seperti adanya NIB tentu akan menambah nilai jual produk

UMKM. Apalagi saat ini Pemkab Sleman juga tengah mendorong para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan produk-produknya di toko modern. "Sehingga saya berharap seluruh pelaku UMKM Sleman dapat siap, baik dari sisi kualitas produk dan pemasaran maupun dalam hal administratif

UMKM," tegasnya.

Ditambahkan, OSS merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang berwenang. Izin ini disetujui dibawah nama menteri, gubernur, walikota/bupati atau pimpinan lembaga. Bentuk izin ini diberikan kepada setiap pelaku usaha dengan menggunakan sistem integrasi secara elektronik. Di mana para pelaku usaha diharuskan untuk memiliki NIB dengan cara mendaftar melalui OSS Republik Indonesia. Saat mengurusnya pelaku usaha tidak akan dikenakan biaya alias gratis. OSS juga berfungsi agar mendapatkan berbagai izin yang digunakan dalam tingkat pusat maupun daerah, pastinya setelah semua izin terpenuhi. **(Has)-f**

## PEREBUTKAN 7 JABATAN ESELON 2

# Puluhan Pejabat Ikut Uji Kompetensi

**SLEMAN (KR)** - Sebanyak 35 peserta seleksi jabatan eselon 2 mengikuti uji kompetensi menggunakan metode assessment center. Hal itu untuk melihat karakter dan intelegensi dari para peserta lelang 7 jabatan eselon 2 di lingkungan Pemkab Sleman.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Priyo Handoyo menjelaskan, para peserta lelang jabatan ini semuanya telah dinyatakan lolos administrasi. Kemudian mulai Senin (11/10), secara bertahap mengikuti uji kompetensi dengan metode assessment center.

"Uji kompetensi dibagi menjadi 4 gelombang. Pertama Senin kemarin. Kemudian dilanjutkan Kamis (14/10), Kamis (21/10) dan Senin (25/10)," jelas Priyo atau kerap dipanggil Ayok ini di kantornya, Rabu (13/10).

Menurutnya, uji kompetensi dengan metode assessment center ini

akan melihat karakter dan intelegensi dari para peserta lelang jabatan eselon 2. Tujuannya mempersiapkan sumber daya manusia aparatur yang berkarakter dan kredibel. "Pemkab Sleman akan memilih calon pejabat eselon 2 yang berkualitas dan berkarakter. Makanya semua peserta akan mengikuti uji kompetensi dengan metode assessment center," terangnya.

Sebagaimana diketahui, tujuh jabatan eselon 2 yang dilelang ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK), Sekretaris DPRD (Sekwan) dan Direktur RSUD Sleman. "Yang jelas seleksi ini terbuka dan transparan. Nanti tiga terbaik akan diajukan ke Bupati untuk dipilih menjadi pejabat eselon 2," papar Ayok.

Sementara itu berdasar penelusuran KR, ada sejumlah pejabat yang diprediksi menjadi calon kuat untuk menduduki jabatan eselon 2 tersebut. Nama-nama tersebut banyak diperbincangkan di lingkup Pemkab Sleman, meski keputusan akhir ada di tangan Bupati.

Nama pejabat yang menjadi calon kuat tersebut di antaranya Aji Wibowo sebagai Kepala Dinkop UKM, Makwan sebagai Kepala BPBD, Sugeng sebagai Kepala DLH, Edi Winaryo di Dinas Kebudayaan, Samsul Bakri sebagai Kepala Dinas PMK, dan Wawan Widiantoro sebagai Sekwan. **(Sni/Has)-f**

## ALIANSI PEDULI LURAH AUDIENSI KE DPRD

# Desak Pencalonan Lurah Terdampak MK Dilanjutkan

**SLEMAN (KR)** - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Calon Lurah Korban Putusan Mahkamah Konstitusi mendatangi Kantor DPRD Sleman untuk melakukan audiensi, Rabu (13/10). Aliansi tersebut mendesak calon lurah korban putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap bisa mengikuti Pemilihan Lurah (Pilur) karena semua tahapan sudah berjalan.

Koordinator aliansi Wahyu Widodo mengatakan, putusan MK tidak serta merta bisa diterapkan di Sleman. Bahkan putusan itu belum diakomodir Kemendagri sebagai acuan pilur. Padahal Pilur di Sleman sudah sesuai

dengan persyaratan. Bahkan persyaratan para lurah itu sudah dinyatakan lengkap dan benar," tandasnya.

Untuk itu, tidak tepat jika para calon lurah yang terdampak putusan MK dicoret sebagai calon. Pencoretan itu akan memberikan dampak sosial dan konflik sosial antar pendukung. "Kami minta Pemkab Sleman berani ambil risiko terkecil yaitu melanjutkan pencalonan Lurah Madurejo. Bahkan kami siap meladeni jika ada gugatan di kemudian hari," ujarnya.

Namun jika Pemkab Sleman tetap akan mencabut izin dan pernyataan tidak pernah menjabat 3 kali, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Mengingat Calon Lurah Madurejo telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dan telah ditetapkan sebagai calon lurah yang berhak dipilih. "Banyak kerugian moral dan materiil yang dialami calon kami," ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan mengaku, akan menampung aspirasi dari aliansi tersebut. Selanjutnya dewan akan komunikasi dengan eksekutif untuk menanyakan kebijakan pas-caputusan MK. "Kami akan segera menanyakan talaah hukumnya atas putusan MK. Kemudian kebijakan yang akan diambil seperti apa terkait 7 calon lurah yang terdampak," ujarnya. **(Sni)-f**

## SLEMAN TERIMA DANA BHCHT RP 1,6 M

# Sosialisasi Cukai Rokok Lewat Ketoprak

**SLEMAN (KR)** - Bertempat di Gedung Kesenian Kabupaten Sleman, Rabu (13/10) berbagai info tentang cukai tembakau disampaikan dengan balutan alur cerita ketoprak dengan lakon Kyai Gemah oleh Sanggar Muda Budaya. Sosialisasi yang dibuka Wakil Bupati Danang Maharsa ini ditujukan kepada para pamong kalurahan.

Menurut Danang, sosialisasi cukai tembakau yang dikemas dalam bentuk pertunjukan seni kebudayaan ketoprak tersebut merupakan salah satu program yang diselenggarakan dengan menggunakan dana dari pengembalian cukai tembakau Kabupaten Sleman pada tahun 2021. "Pada tahun ini, Sleman mendapatkan pengembalian cukai tembakau dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 1,6 miliar yang juga akan dimanfaatkan untuk sosialisasi dalam berbagai program. Salah satunya

yang dikemas dalam Seni Kebudayaan ketoprak dan juga dalam bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat tidak mampu terutama buruh pabrik dan petani tembakau," jelasnya.

Danang juga menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap cukai tembakau ilegal sehingga turut serta membantu mengoptimalkan penerimaan

Negara di sektor cukai tembakau. "Terlebih selama pandemi seluruh kegiatan kesenian ditiadakan. Maka, dengan dana pengembalian cukai ini kita memanfaatkan untuk kembali memberikan dukungan kepada para pelaku seni untuk kembali berpentas," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang diwakili oleh Andriyans Wunika Susi Lestyaning mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan salah satu upaya

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait cukai legal yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Sosialisasi agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tembakau yang kemudian menghasilkan dan memberikan pendapatan bagi daerah, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui kegiatan positif olahraga, seni, kebudayaan dan lainnya," jelasnya. **(Has)**

## Studium General Fakultas Hukum UWM Bermedsos Sesuai Etika yang Berlaku



Moderator dan 2 pemateri saat memberikan paparan dalam acara Studium General Fakultas Hukum UWM.

**YOGYA (KR)** -- Aspek etika berpendapat sangat signifikan, seperti ujaran kebencian dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat atau bahkan melanggar hukum. Sehingga kebebasan berpendapat harus sesuai etika yang berlaku. "Berhati-hatilah dalam bermedsos, baik itu berupa kata-kata, gambar yang tidak etis," tegas Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof Dr Edy Suandi Hamid Mec saat membuka Studium General yang diselenggarakan Fakultas Hukum UWM, Rabu, (13/10) di Pendopo UWM dengan model offline dan cloud zoom.

Prof Edy memontokkan terdapat beberapa kebijakan di negara-negara maju, seperti membolehkan berciuman di tempat umum dan berpakaian tidak menjadi masalah disana. "Akan tetapi jangan melakukannya di sini, karena akan dianggap tidak etis," tegasnya.

Studium General dengan tema "Problematika Kebebasan Menyampaikan Pendapat Berhadapan dengan Etika Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Perspektif Hukum" ini diisi pemateri yang kompeten, yaitu AKBP Muharomah Fajarini SH SIK. (Kapolda Kulon Progo), Dr Zaki Sierraj SH CN MH (Dosen FH UWM), Dr Aida Dewi SH MH. (Dosen FH UWM) dan Anang Masduki MA Ph.D (Cand) (Dosen Ilmu Komunikasi UAD), dengan moderator Edy Christanto SE SH MH.



Prof Edy Suandi Hamid, M.Ec. (Rektor UWM) saat membuka acara dan memberikan sambutan.

"Negara yang kita cintai, NKRI, pasti memberikan perlindungan kepada kita, termasuk dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial. Karena kita termasuk orang-orang yang cerdas maka di zaman 4.0 ini dalam menggunakan media sosial harus cerdas," tegas M Fajarini.

Ditegaskan agar jangan mengedepankan kebebasan semata. "Untuk menciptakan ketertiban agar tidak terjadi konflik maka akan terwujud security, safety, surety dan peace," ujar M Fajar dalam paparannya. **(Vin)**